

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Determinan yang diuji dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, *intergovernmental revenue*, dan jumlah penduduk. Sampel yang digunakan adalah 74 Laporan Keuangan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 dan 2016. Pengujian pengaruh antar variabel dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS. Kesimpulan penelitian ini adalah kekayaan daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pengungkapan wajib, standar akuntansi pemerintahan .

ABSTRACT

This study aims to analyze factors that influence mandatory disclosure on Local Government of East Java financial statement, based on PP No. 71/2010 Indonesia Government Accounting Standard with accrual basis. Factors that examined in this study are wealth, educational background of local government chief, intergovernmental revenue, and population. The sample that used in this study are 74 financial statement of Local Government of East Java Province for 2015 to 2016. Multiple regression analysis was performed by SPSS. This study concluded that wealth and population have positive effect on mandatory disclosure of Local Government financial statement, while educational background of local government chief and intergovernmental revenue have no effect on mandatory disclosure of Local Government financial statement.

Keywords: Local government financial statement, mandatory disclosure, government accounting standard.